

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.(R. Firmansyah, 2020)

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol "Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)". Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. (Sarwenda kuling, 2015)

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang berhubungan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. (R. Dionisius, 2012)

Kepala Desa Besmarak (Petrus Timate) mengatakan bahwa di Desa Besmarak mayoritas masyarakat sebagai petani. Kepala Desa Besmarak juga menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi desa secara turun temurun adalah kurangnya penyediaan air bersih bagi masyarakat dan pemanfaatan lahan kering. Oleh karena itu masalah yang di alami masyarakat di Desa Besmarak sebelumnya belum di perhatikan oleh pemerintah setempat khususnya pada “sektor pertanian”. Untuk itu ditahun 2022, Kepala Desa Besmarak mengalokasikan dana desa secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Desmarak. Sehingga sampai saat ini, masyarakat merasa sangat terbantu dengan program-program yang dibuat melalui dana Desa, yaitu salah satunya program pengadaan sumur bor untuk mengatasi masalah yang ada di Desa Besmarak .

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa
Tahap III Tahun 2022
Pemerintah Desa Besmarak Kecamatan Nekamese

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	6	7	8
1	PENDAPATAN			
1.2	Pendapatan transfer			
1.2.1.1	Dana Desa	729.893.000,00	729.893.000,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	729.893.000,00	729.893.000,00	0
2	BELANJA DESA			
2.02	BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA			
2.02.01.01	Peyelenggaraan PAUD/TPA/TK/TPQ/(Madrasah) 01 Insentif Guru PAUD	3.600.000,00 12.582.500,00	3.600.000,00 11.371.885,00	0 1.120.815,00
2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn.Tambahan) 01 PMT Insentif Kader Posyandu, Insentif KPM	18.000.000,00	18.000.000,00	0
2.02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan 01 Pembangunan Jalan Desa	134.648.700,00	0	0,00
2.02.04.11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih 01 Pembangunan Sumur Bor	163.520.954,44	155.223.773,00	7.297.181,00
2.02.04.99	Lain Lain Sub Bidang Pembangunan Rumah Rakyat	55.074.375,00	55.074.375,00	1.506.125,00

Sumber: Laporan ADD Desa Besmarak Tahun 2022.

Pada tanggal 23 Januari Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kupang memberikan bantuan untuk masyarakat Desa Besmarak melalui dana desa berupa bantuan membangun jaringan air bersih. Atas pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) oleh warga Desa Besmarak, Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat mengapresiasi. Pemerintah Kabupaten Kupang

mengapresiasi terhadap pemerintah dan masyarakat Desa Besmarak yang membangun sumur bor untuk kebutuhan air bersih warga serta mengairi lahan pertanian, sehingga dapat mendorong perekonomian warga. Bupati Korinus Masneno mengatakan pengresmian pembangunan sumur bor di Desa Besmarak yang dibangun dengan dana desa Tahun Anggaran 2020/2021 senilai Rp.300.000,000. Keberhasilan sebuah pemerintahan terletak pada keberhasilan sebuah desa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Besmarak, Petrus Timate mengaku bangga atas tersedianya sarana air bersih bagi kebutuhan masyarakat. Kepala Desa Besmarak mengatakan lahan pertanian Desa Besmarak seluas 40 hektare, dan baru dikelola oleh warga seluas 11 hektare. Kepala Desa besmarak juga mengatakan tanaman hortikultura dirasakan sangat membantu ekonomi para petani sehingga dibutuhkan air yang memadai untuk mengairi lahan pertanian yang ada. Pendapatan warga dari usaha pertanian bisa mencapai Rp.100.000.000-Rp.500.000.000/tahun dari tanaman hortikultura yang dipasarkan ke wilayah Kota Kupang.(Kepala Desa Besmarak)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Napitupulu (2016), “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir”. Penelitian Napitupulu (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen dan Pengembangan Wilayah sebagai variabel dependen dan metode yang digunakan yakni deskriptif kuantitatif. Penelitian Arman Chalid Sinarmata

(2016) “Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Kabupaten Serdang Bagadai”. Penelitian Arman Chalid Sinarmata (2016) menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen dan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Kabupaten Serdang Bagadai sebagai variabel dependen. Penelitian Arman Chalid Sinarmata (2016) menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian Arman Chalid Sinarmata (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kepada masyarakat secara transparan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehingga dalam penelitian ini, menggunakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Besmarak sebagai variabel dependen serta metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Besmarak”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang ada adalah “Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Besmarak”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah

1. Program apa yang meningkatkan kesejahteraan di Desa Besmarak?
2. Bagaimana Pengalokasian Dana Desa di Desa Besmarak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Bagaimana Pengalokasian Dana Desa di Desa Besmarak

1. Untuk mengetahui Program apa yang meningkatkan kesejahteraan di Desa Besmarak
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengalokasian Dana Desa di Desa Besmarak

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1) **Kemanfaatan Akademik**

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan untuk menjadi pengembangan bagi jurusan akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2) **Kemanfaatan Praktis**

Dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dan untuk salah satu syarat mengikuti ujian skripsi dan moral komperhensif sarjana lengkap pada fakultas ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.